



**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
JENDERAL SUMBER DAYA  
ILMUPENGETAHUAN,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI  
TAHUN 2016 - 2019**



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyusun Rencana Strategis untuk periode Tahun 2015-2019 yang dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi dengan Satker, dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 merupakan pedoman dan arah pembangunan bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan tinggi yang hendak dicapai pada periode 2015-2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis untuk (1) penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan RKA-KL; (2) pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan; (3) pemantauan dan evaluasi (Renja, Renstra, dan LAKIP). Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

TTD  
Ali Ghufron Mukti

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum .....	4
1.2. Aspirasi Masyarakat terhadap Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi . 5	
1.2.1. Aspirasi Masyarakat Terhadap Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	5
1.2.2. Aspirasi Masyarakat Terhadap Sumber Daya Pendidikan Tinggi.....	6
1.3. Tantangan .....	12
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM .....</b>	<b>14</b>
2.1. Visi .....	14
2.2. Misi.....	14
2.3. Tujuan.....	15
2.4. Sasaran Program.....	15
2.5. Indikator Kinerja Program.....	17
<b>BAB III PEMETAAN SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	
<b>DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI</b>	
<b>DAN PENDIDIKAN TINGGI .....</b>	<b>18</b>
3.1. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi .....	18
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>25</b>
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019.....	26



## DAFTAR TABEL

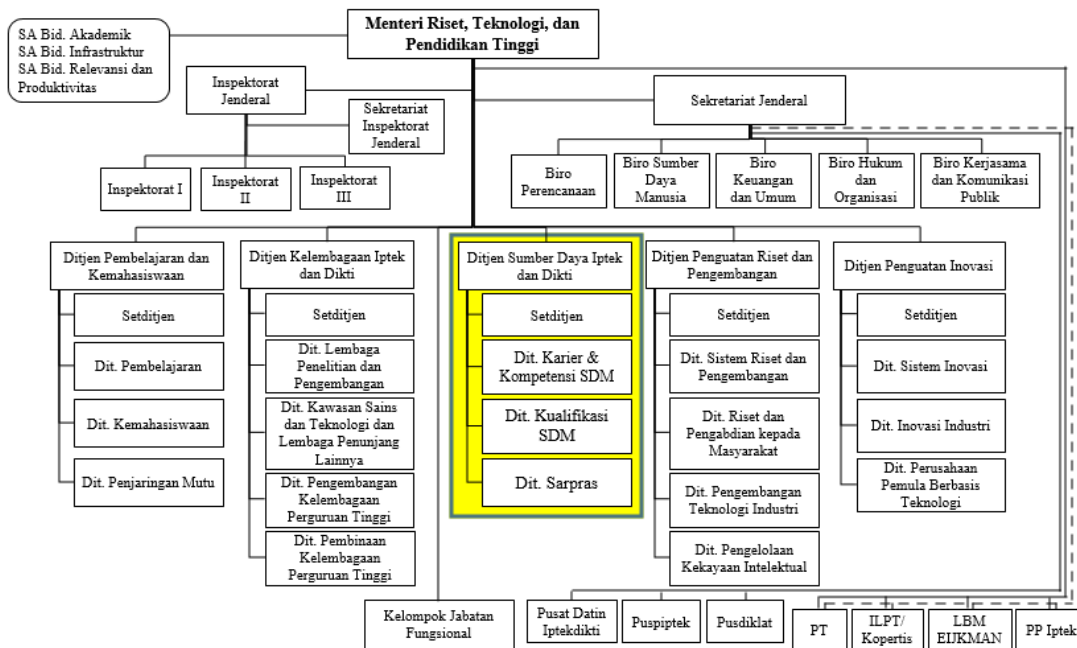
Tabel 1. Publikasi Ilmiah Beberapa Negara .....	12
Tabel 2. Jumlah dosen di beberapa Negara Asia .....	13
Tabel 3. Jumlah Permintaan Paten antara Negara-Negara ASEAN dan Jepang .....	13
Tabel 5. Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi .....	20
Tabel 6. Output Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Kemenristekdikti.....	1
Gambar 2.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ditjen SDID) .....	4
Gambar 3.	Ekspektasi Masyarakat terhadap Peran Perguruan Tinggi.....	6

# BAB I PENDAHULUAN

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memiliki mandat untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Mandat tersebut dijalankan oleh organisasi Kemenristekdikti sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Struktur Organisasi Kemenristekdikti diperlihatkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kemenristekdikti

Dalam melaksanakan tugas di atas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi;

- b. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Salah satu unit kerja di lingkungan Kemenristekdikti adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ditjen SDID). Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



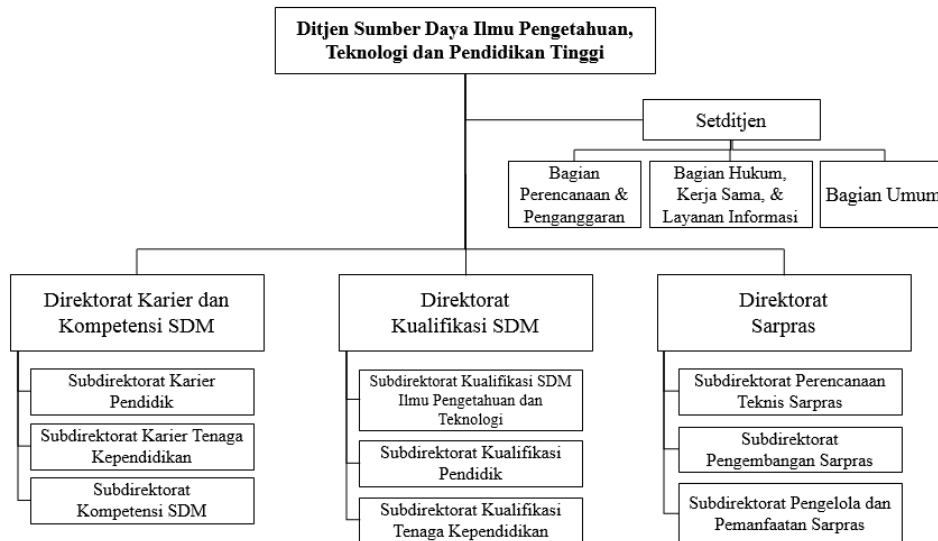
Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendidikan tinggi serta perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendidikan tinggi;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki struktur organisasi yang ditunjukkan dalam Gambar 2.

Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari Kemenristekdikti perlu melakukan penyusunan revisi Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016-2019 sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi di atas.



**Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ditjen SDIT)**

### 1.1. Kondisi Umum

Bertolak dari fakta yang ada sekarang menunjukkan bahwa kemajuan Indonesia dalam menangani masalah SDM Iptek khususnya ketercukupan jumlah dosen, ilmuwan, dan perekayasa masih perlu ditingkatkan. Disamping itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi, Indonesia membutuhkan banyak tenaga terampil dari berbagai profesi. Sampai sekarang uji kompetensi dan sertifikasi tenaga terampil baru dilakukan untuk tenaga di bidang kesehatan. Untuk tenaga profesi yang lain yaitu insinyur, akuntan, dan arsitek belum dilakukan.

Dari aspek investasi litbang, perhatian pemerintah terhadap iptek dalam tiga dekade terakhir menunjukkan penurunan terus menerus. Memang secara nominal terjadi peningkatan, namun rasio terhadap keseluruhan APBN terus mengalami penurunan. Pemerintah juga masih merupakan penyedia dana terbesar dan juga pelaku terbesar dari kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia sedangkan sektor swasta masih sangat terbatas peranannya, baik sebagai pelaku apalagi sebagai penyedia dana.

Oleh karena itu Sasaran Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan sasaran program yang harus ditingkatkan yaitu:

1. Persentase dosen berkualifikasi S3.
2. Jumlah SDM yang meningkat karirnya.
3. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya.
4. Jumlah revitalisasi sarpras PTN.
5. Persentase SDM Litbang Berkualifikasi S3.

## **1.2. Aspirasi Masyarakat terhadap Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

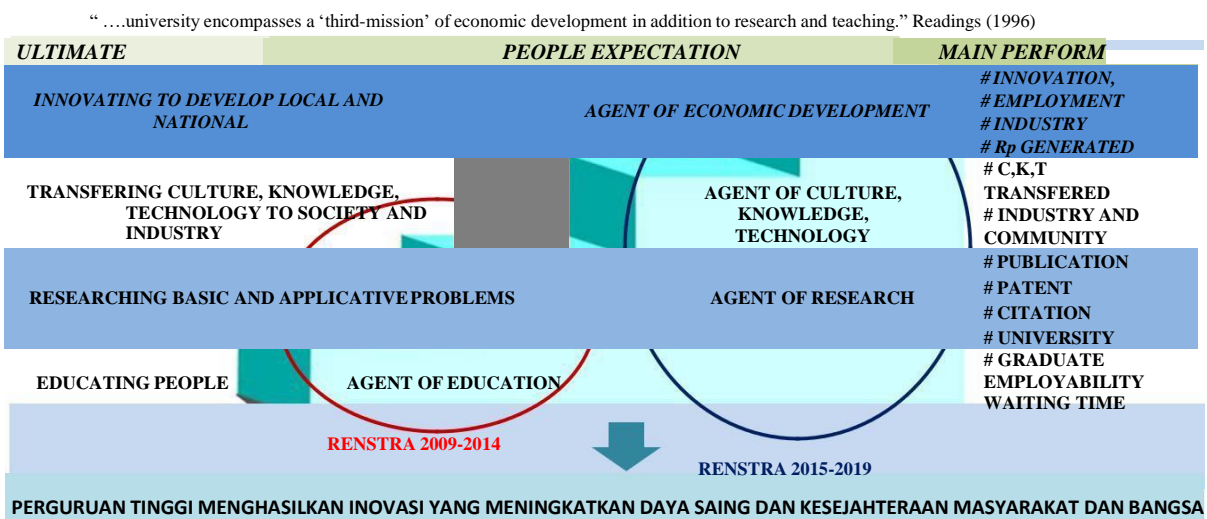
### **1.2.1. Aspirasi Masyarakat Terhadap Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Perkembangan situasi perekonomian dunia yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian perekonomian menuntut Indonesia terus menerus memperkuat daya saing dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Untuk itu, masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari lemlitbang, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, lembaga penunjang, dan seluruh pemangku kepentingan bidang Iptek mengharapkan peran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk meningkatkan dan memperkokoh daya saing ekonomi nasional dengan mewujudkan program-program nyata.

Lemlitbang mengharapkan agar Kemenristekdikti dapat menyediakan pendanaan dan Sarpras Iptek yang memadai dan mendorong pemanfaatan hasil litbang. Dan industri meminta Kemenristekdikti untuk menyediakan peralatan produksi dengan teknologi mutakhir, teknologi produksi (improvisasi), teknologi untuk pengembangan produk (diversifikasi produk), sumber daya manusia yang terampil, dukungan untuk peningkatan produktivitas, dan *risk sharing*. Tambahan pula, masyarakat mengharapkan Kemenristekdikti untuk menyiapkan teknologi tepat guna dan produk-produk teknologi yang harganya terjangkau (kompetitif) sehingga mampu menjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat.

### 1.2.2. Aspirasi Masyarakat Terhadap Sumber Daya Pendidikan Tinggi

Ekspektasi masyarakat pada Perguruan Tinggi berkembang seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3. Pada saat pertama kali Perguruan Tinggi berdiri, masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai *agent of education*. Saat Perguruan Tinggi sudah mampu memerankan dirinya sebagai *agent of education*, masyarakat berharap lebih, Perguruan Tinggi tidak hanya dapat memerankan dirinya sebagai *agent of education* tetapi juga memerankan diri sebagai *agent of research and development*. Harapan ini terus berlanjut sampai sekarang ini, dimana masyarakat berharap Perguruan Tinggi dapat memerankan dirinya sebagai *agent of knowledge and technology transfer* dan akhirnya Perguruan Tinggi sebagai *agent of economic development*.



Gambar 3. Ekspektasi Masyarakat terhadap Peran Perguruan Tinggi

Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai *agent of economic development*, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. Meskipun sekarang ini secara spesifik belum pernah di monitor kemampuan Perguruan Tinggi Indonesia menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat, banyak penelitian-penelitian Perguruan Tinggi yang sudah siap dihilirkan untuk bisa mendatangkan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ke depannya, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat.

Guna merealisasikan harapan-harapan tersebut, Kemenristekdikti menyadari bahwa salah satu kunci utamanya adalah penyediaan Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi yang relevan dan mampu menjawab dinamika harapan para pemangku kepentingan. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi, selaku unit utama yang membidangi pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, berupaya menjawab harapan tersebut dengan berbagai program dan kebijakan yang menjadi solusi bagi pemenuhan harapan publik.

Penguatan di ranah sumber daya meliputi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia beserta sarana dan prasarana penunjangnya. Dalam lingkup Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melihat bahwa peningkatan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusianya yaitu, peneliti, dosen dan tenaga pendidik merupakan entitas yang harus terus ditingkatkan. Beasiswa peningkatan kualifikasi dan skema penguatan kompetensi diharapkan mampu untuk menjadi sarana peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi meningkatkan pelayanan di bidang karir khusus bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan pendidikan tinggi, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Pelayanan pada bidang karir ini diharapkan menjadi daya ungkit bagi motivasi dan tanggung jawab Sumber Daya Manusia di pendidikan tinggi untuk melakukan atau mendukung pelaksanaan Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

Pada sarana prasarana penunjang pendidikan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek, dan Pendidikan Tinggi berupaya untuk terus meningkatkan dan memutakhirkan sarana dan prasarana penunjang yang relevan dengan kondisi perkembangan dunia global. Dalam implementasinya, direncanakan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang akan ditingkatkan adalah laboratorium terintegrasi guna menjunjung prinsip efektifitas dan efisien.

Dengan adanya laboratorium terintegrasi diharapkan akan terdapat kolaborasi riset berbagai di bidang tidak hanya di dalam Perguruan Tinggi, tetapi juga antar Perguruan Tinggi.

### 1.3. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai harapan para pemangku kepentingan terkait kondisi Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi secara garis besar sangat terkait dengan kualitas dan kuantitas yang melekat pada sumber daya itu sendiri. Pada Sumber Daya Manusia di pendidikan tinggi, pada kategori dosen, saat ini tercatat masih terdapat lebih dari 25.000 dosen di Indonesia yang berpendidikan terakhir S1, padahal sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen, para pendidik di Perguruan Tinggi haruslah berpendidikan minimal S2. Selanjutnya terkait dengan kompetensi dosen, rujukan sederhana yang dapat kita perhatikan adalah publikasi internasional yang dihasilkan oleh dosen Indonesia masih terlampau minim apabila dibandingkan dengan publikasi internasional yang dihasilkan oleh dosen di beberapa negara di regional ASEAN. Pada Tabel 1 terlihat bahwa posisi Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand dalam publikasi ilmiah internasional.

**Tabel 1. Publikasi Ilmiah Beberapa Negara**

Peringkat	Negara	Dokumen	Dokumen yang Dapat	Jumlah Kutipan	Mengutip Sendiri	Kutipan Per Dokumen	Indeks-H
32	Singapura	149.509	144.653	1.616.952	230.656	12,95	268
40	Malaysia	99.187	97.018	356.918	93.479	7,85	125
43	Thailand	82.209	79.537	621.817	109.600	10,96	167
61	Indonesia	20.166	19.740	146.670	16.149	10,94	112
67	Vietnam	16.474	16.116	125.927	18.500	11,79	107
70	Filipina	13.163	12.796	141.070	15.727	13,38	116

Sumber: Bappenas (2014)

Bila memperhatikan korelasi antara jumlah dosen yang dimiliki Indonesia dengan hasil publikasi internasional yang dihasilkannya, maka kondisi tersebut sangatlah bertolak belakang. Jumlah dosen Indonesia yang besar nampaknya tidak dapat menjadi pondasi yang kuat dalam menghasilkan publikasi ilmiah internasional.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa jumlah dosen Indonesia jauh lebih banyak di bandingkan dengan jumlah dosen Malaysia dan Vietnam, namun dari publikasi ilmiah internasionalnya, Indonesia masih berada di bawah Malaysia, bahkan bila dibandingkan rasio dosen dan publikasi internasional yang dihasilkan, cenderung terlihat bahwa Vietnam lebih baik.

**Tabel 2. Jumlah dosen di beberapa Negara Asia**

No	Indikator	Indonesia <sup>1</sup>	Jepang <sup>2</sup>	Malaysia <sup>3</sup>	Vietnam <sup>4</sup>
1	Jumlah Penduduk**	258.316.051	126.702.133	30.949.962	95.261.021
2	Jumlah Dosen berkualifikasi S3	29.140	178.669	15.399	9.152
3	Jumlah Dosen	191.433	178.669	45.652	45.512
5	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	15,2%*	100%	34%	20%
6	Rasio dosen per satu juta penduduk	109	1.410	498	96

<sup>1</sup> Data PD-Dikti, 19 November 2016

<sup>2</sup> Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan (MEXT), 2013

<sup>3</sup> Indikator Pengajian Tinggi Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013

<sup>4</sup> Ministry of Education and Training Viet Nam, 2010

\* Dihitung berdasarkan jumlah dosen berkualifikasi S2 dan S3 saja

\*\* Worldfact CIA Tahun 2016

Tantangan serupa dapat ditemui pula pada lingkup Sumber Daya Manusia penelitian yang tersebar di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lemlitbang) dan Industri. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa permintaan Paten Indonesia belum berada pada angka yang menyenangkan, jumlah dan pertumbuhan permintaan Paten baik internasional maupun nasional masih tertinggal dari Negara lain.

**Tabel 3. Jumlah Permintaan Paten antara Negara-Negara ASEAN dan Jepang**

No	Negara	<i>International Patent</i>			<i>Domestic Patent</i>		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	Indonesia	7	16	13	684	795	777
2	Malaysia	224	350	263	1.263	1.275	1.136
3	Filipina	21	14	21	668	759	822
4	Singapura	593	641	661	750	895	1.056
5	Thailand	20	72	67	2.441	2.452	2.161
6	Vietnam	5	9	18	524	521	493
7	Jepang	29.802	32.150	3.875	303,114	296,970	293,885

Sumber: WIPO dan Kantor Paten Negara Bersangkutan, 2013.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM**

Dalam rangka melaksanakan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mencermati potret permasalahan yang telah diuraikan pada BAB I, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

#### **2.1. Visi**

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2015-2019 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2015-2019 Kemenristekdikti menetapkan visi sebagai berikut:

**“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”**

Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumber daya, dan jaringan). Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi.

#### **2.2. Misi**

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Kemenristekdikti adalah:

1. Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas;



2. Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam aspek pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi.

### **2.3. Tujuan Strategis**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kemenristekdikti seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kemenristekdikti, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah :

1. Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa;
2. Meningkatnya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berintegritas dalam rangka reformasi birokrasi.

### **2.4. Sasaran Strategis**

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi; dan
3. Terlaksananya reformasi birokrasi.

Untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian sasaran strategis tersebut perlu ditetapkan ukuran indikator tujuan tersebut secara kuantitatif. Dalam rancangan lima tahun ke depan, indikator kinerja sasaran strategis diukur dengan indeks pendidikan tinggi pada tahun 2019 ditargetkan mencapai nilai 42,25 (empat puluh dua koma dua puluh lima); indeks inovasi Indonesia pada tahun 2019 ditargetkan mencapai nilai 32,41 (tiga puluh dua koma empat puluh

satu); dan indeks reformasi birokrasi Kemenristekdikti ditargetkan mencapai nilai 85 (delapan puluh lima).

## **2.5. Arah Kebijakan**

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pembangunan kemampuan Iptek dan inovasi, serta peningkatan kontribusi Iptek untuk mendukung peningkatan daya saing nasional bukan lagi sebuah pilihan namun menjadi sebuah keniscayaan. Arah kebijakan Kemenristekdikti adalah:

1. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang;
3. Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas;
4. Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan;
5. Meningkatkan inovasi bangsa; dan
6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sedangkan, fokus utama pembangunan Iptek di Kemenristekdikti mengacu pada RPJPN 2005-2025, yaitu ditujukan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Iptek pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. Pangan;
2. Energi;
3. Teknologi dan Manajemen Transportasi;
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Teknologi Pertahanan dan Keamanan;
6. Teknologi Kesehatan dan Obat; dan
7. Material Maju.

Disamping itu fokus di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditambah 3 (tiga) bidang sebagai berikut:

1. Maritim;
2. Kebencanaan; dan
3. Sosial humaniora, seni budaya, dan pendidikan.

## **2.6. Indikator Kinerja Program**

Berdasarkan amanah sasaran strategis dari Kemenristekdikti, sasaran program Ditjen SDID, serta arah kebijakan dan strategi Ditjen SDID terkait dengan peningkatan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas, ditetapkan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

1. Persentase dosen berkualifikasi S3
2. Jumlah SDM yang meningkat karirnya
3. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya
4. Jumlah revitalisasi sarpras PTN
5. Persentase SDM Litbang Berkualifikasi S3

### **BAB III**

## **PEMETAAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

### **3.1. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

Dosen sebagai tenaga pendidik profesional dan ilmuwan memiliki peran sentral dalam proses transformasi peserta didik yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya tersebut, dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan Sertifikasi Pendidik Profesional sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya. Amanat tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan Program Magister untuk Program Diploma atau Program Sarjana dan lulusan Program Doktor untuk program Pascasarjana.

Sampai dengan tahun 2014, berdasarkan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) proporsi dosen berpendidikan Doktor masih rendah, yaitu hanya 12.48%. Berdasarkan fakta ini, pemetaan target kinerja bagi tenaga pendidik di Perguruan Tinggi harus diarahkan pada dua arah yaitu pemenuhan jumlah yang dibutuhkan dan peningkatan kualifikasi dosen hingga taraf pendidikan S3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kuantitas dosen yang memiliki kualifikasi akademik minimal Magister melalui beragam pendekatan.

Di sisi lain, pendidikan tinggi mempunyai kegiatan yang terkait dengan riset dan pengembangan teknologi. Sehingga dibutuhkan integrasi dan sinergi menyeluruh antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) (seperti BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), BIG (Badan Informasi Geospasial), BSN (Badan Standarisasi Nasional), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional), BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)), serta Lembaga Pendidikan dan Kejuruan (LPK) dan juga Pemerintah Daerah. Namun demikian, perencanaan Sumber Daya Manusia saat ini masih terbatas pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun Tenaga Penelitian belum termasuk di dalam perencanaan tersebut. Sehingga dalam pemetaan target kinerja Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi diperlukan penyusunan sistem karir dan remunerasi serta kebutuhan perencanaan peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Tenaga Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lemlitbang) yang memiliki kualifikasi akademik Master dan Doktor.

Pemetaan target kinerja Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga termasuk didalamnya revitalisasi sarana dan prasarana baik pada Perguruan Tinggi Negeri maupun pada lembaga litbang. Perguruan Tinggi Negeri prioritas penerima revitalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan urutan Perguruan Tinggi Negeri di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), Perguruan Tinggi Negeri Baru Non-Eks Swasta, dan Perguruan Tinggi Negeri Bidang Strategis Nasional dan Perguruan Tinggi Negeri Baru Eks Swasta. Terkait dengan revitalisasi sarana dan prasarana ini dibutuhkan suatu perencanaan strategis pemenuhan penyelesaian pengadaan termasuk ketersediaan dan kesiapan Sumber Daya Manusia yang berperan sebagai pengelola dan penggunaanya dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi pada saat pencapaian fisik penyelesaian pekerjaannya.

Berdasarkan Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan pada periode 2015- 2019 pada BAB II maka dapat disusun Sasaran Program (SP) untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator Indikator Kerja Program (IKP) tersebut. Tabel 4 merupakan gambaran yang rinci mengenai Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Renstra Kemenristekdikti) tercermin di dalamnya Sasaran Strategis (SS) yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yaitu meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Tabel 5 menggambarkan secara lebih terperinci mengenai Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan target yang akan dicapai pada periode 2015-2019.

**Tabel 5. Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

KODE	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Program (IKP)	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
SS	Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan pendidikan tinggi					
IKP 1	Persentase dosen berkualifikasi S3	10,05%	11,32%	13,09%	14,86%	16,63%
IKP 2	Jumlah SDM yang meningkat kariernya	12.901	17.392	19.228	20.364	21.500
IKP 3	Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya	871	1.347	2.141	2.641	3.061
IKP 4	Jumlah Revitalisasi Sarpras PTN	108	108	118	118	118
IKP 5	Persentase SDM Litbang berkualifikasi S3	5,5%	6%	6,2%	6,4%	6,8%

Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis (SS), yaitu meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) dicapai melalui Sasaran Kegiatan (SK-Output), dan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diuraikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Output Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

Sasaran Program (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</b>							
SK(Output) 1	<b>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>		8	13	25	25	25
	IKK 1.1	Jumlah dokumen perencanaan program dan Penganggaran	3	3	3	3	3
	IKK 1.2	Jumlah dokumen hukum, humas, dan kerjasama	3	3	3	3	3
	IKK 1.3	Jumlah dokumen layanan pengelolaan aset BMN	1	1	1	1	1
	IKK 1.4	Jumlah dokumen layanan kepegawaian	1	1	1	1	1
	IKK 1.5	Jumlah layanan tata usaha pimpinan	-	-	12	12	12
	IKK 1.6	Jumlah dokumen layanan pengembangan sistem SDID	-	1	1	1	1
	IKK 1.7	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Iptek dan Dikti	-	1	1	1	1
	IKK 1.8	Jumlah layanan pelaksanaan PHLN	-	1	1	1	1
	IKK 1.9	Jumlah dokumen pengembangan Rumah Sakit Pendidikan	-	1	1	1	1
SK(Output) 2	<b>Layanan Perkantoran</b>		12	12	12	12	12
	IKK 2.1	Jumlah operasional layanan perkantoran Satker	12	12	12	12	12
<b>Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Dikti</b>							
SK(Output) 1	<b>Layanan tata usaha pimpinan</b>		12	12	12	12	12
	IKK 1.1	Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12
SK(Output) 2	<b>Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Karir dan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi</b>		1	1	1	1	1
	IKK 2.1	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan peningkatan karir SDM Dikti	1	1	1	1	1
SK(Output) 3	<b>Sistem Pengelolaan Data dan Informasi SDM Dikti</b>		2	2	2	2	2
	IKK 3.1	Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi pendidik	1	1	1	1	1
	IKK 3.2	Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi tenaga kependidikan	1	1	1	1	1
SK(Output) 4	<b>SDM DIKTI yang Mengikuti Pembinaan karir</b>		12.500	16.000	16.100	16.300	16.500

Sasaran Program (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	IKK 4.1	Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	IKK 4.2	Jumlah usulan angka kredit dosen yang dinilai	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	IKK 4.3	Jumlah usulan angka kredit tenaga kependidikan yang dinilai	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	IKK 4.4	Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti riset untuk peningkatan karir	-	-	100	300	500
SK(Output) 5	<b>SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi</b>		1.496	1.880	2.460	2.510	2.510
	IKK 5.1	Jumlah pendidik yang mengikuti peningkatan kompetensi	490	790	1.240	1.290	1.290
	IKK 5.2	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	IKK 5.3	Jumlah pendidik yang meraih prestasi	1	15	15	15	15
	IKK 5.4	Jumlah tenaga kependidikan yang meraih prestasi	5	75	105	105	105
<b>Kegiatan : Peningkatan Kompetensi SDM Iptek</b>							
SK(Output) 1	<b>SDM Iptek yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi</b>		200	200	200	200	200
	IKK 1.1	Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya	200	200	200	200	200
SK(Output) 2	<b>Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi SDM Iptek</b>		1	1	1	1	1
	IKK 2.1	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Iptek	1	1	1	1	1
<b>Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Dikti</b>							
SK(Output) 1	<b>Layanan tata usaha pimpinan</b>		12	12	12	12	12
	IKK 1.1	Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12
SK(Output) 2	<b>Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Dikti</b>		1	1	1	1	1
	IKK 2.1	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana	1	1	1	1	1
SK(Output) 3	<b>PTN yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana</b>		108	108	118	118	118
	IKK 3.1	Jumlah dokumen perencanaan teknis sarana dan prasarana Dikti	-	-	1	1	1
	IKK 3.2	Jumlah dokumen pengembangan sarana dan prasarana Dikti	-	-	1	1	1



Sasaran Program (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	IKK 3.3	Jumlah dokumen pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Dikti	-	-	1	1	1
	IKK 3.4	Jumlah PTN yang direvitalisasi sarana dan prasarannya	108	108	118	118	118
<b>Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Iptek</b>							
SK(Output) 1	<b>Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Iptek</b>		-	1	1	1	1
	IKK 1.1	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek	-	1	1	1	1
SK(Output) 2	<b>Lembaga Litbang yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana</b>		-	-	15	17	19
	IKK 2.1	Jumlah dokumen perencanaan teknis sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1
	IKK 2.2	Jumlah dokumen pengembangan sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1
	IKK 2.3	Jumlah dokumen pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1
	IKK 2.4	Jumlah lembaga Litbang yang direvitalisasi sarana dan prasarannya	-	-	15	17	19
<b>Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi SDM Dikti</b>							
SK (Output) 1	<b>Layanan Tata Usaha Pimpinan</b>		12	12	12	12	12
	IKK 1.1	Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12
SK (Output) 2	<b>Beasiswa SDM Dikti</b>		12.036	12.035	13.132	12.845	12.767
	IKK 2.1	Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S2 Dalam Negeri	2.459	2.459	1.667	1.155	1.240
	IKK 2.2	Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S3 Dalam Negeri	6.366	6.366	8.205	8.447	8.265
	IKK 2.3	Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S2 Luar Negeri	144	143	61	-	-
	IKK 2.4	Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S3 Luar Negeri	967	967	1.099	1.143	1.162
	IKK 2.5	Jumlah SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Non Gelar	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SK (Output) 3	<b>Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualifikasi SDM Dikti</b>		-	1	1	1	1
	IKK 3.1	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Dikti	-	1	1	1	1

Sasaran Program (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Litbang</b>							
SK (Output) 1	<b>Beasiswa SDM IPTEK</b>		657	1.813	1.830	1.872	699
	IKK 1.1	Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S2 Dalam Negeri	179	145	175	210	270
	IKK 1.2	Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S3 Dalam Negeri	100	86	89	102	125
	IKK 1.3	Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S2 Luar Negeri	28	80	151	125	73
	IKK 1.4	Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S3 Luar Negeri	103	272	272	245	231
	IKK 1.5	Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Pendidikan Non Gelar	247	1.230	1.143	1.190	-
SK (Output) 2	<b>Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualifikasi SDM Iptek</b>		2	2	2	2	2
	IKK 2.1	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Iptek	1	1	1	1	1
	IKK 2.2	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Sistem Inovasi Nasional (Riset Pro)	1	1	1	1	1

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016-2019, yang merupakan revisi dari Renstra Ditjen SDID 2015-2019, akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Kegiatan-kegiatan dengan output serta sub output yang telah dirinci di atas, mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran Sekretariat dan Direktorat serta berbagai sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh *stakeholders*. Kerja keras dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Direktorat Jenderal yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.

### Lampiran 1.

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

Pro gra m/ Ke giat an	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SP (Outcome) 3 : Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti											
	IKP 3.1 : Persentase dosen berkualifikasi S3	10,05%	11,32%	13,09%	14,86%	16,63%						
	IKP 3.2 : Jumlah SDM yang meningkat Karirnya	12.901	17.392	19.228	20.364	21.500						
	IKP 3.3 : Jumlah SDM yang kompetensinya	871	1.347	2.141	2.641	3.061						
	IKP 3.4 : Jumlah revitalisasi sarpras PTN	108	108	118	118	118						
	IKP 3.5 : Persentase SDM Litbang Berkualifikasi S3	5,5%	6%	6,2%	6,4%	6,8%						
	Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti						43.500	62.000	222.000	222.000	222.000	Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
	SK (Output) 1 : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	8	13	25	25	25	33.500	52.000	207.000	207.000	207.000	
	IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program dan penganggaran	3	3	3	3	3						
	IKK 1.2 : Jumlah dokumen hukum, humas, dan kerjasama	3	3	3	3	3						
	IKK 1.3 : Jumlah dokumen layanan pengelolaan aset BMN	1	1	1	1	1						
	IKK 1.4 : Jumlah dokumen layanan kepegawaian	1	1	1	1	1						
	IKK 1.5 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	-	-	12	12	12						

Pro gra m/ Ke giat an	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 1.6 : Jumlah dokumen layanan pengembangan sistem SDID terintegrasi	-	1	1	1	1						
	IKK 1.7 : Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Iptek dan Dikti	-	1	1	1	1						
	IKK 1.8 : Jumlah layanan pelaksanaan PHLN	-	1	1	1	1						
	IKK 1.9 : Jumlah dokumen pengembangan Rumah Sakit Pendidikan	-	1	1	1	1						
	SK (Output) 2 : Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
	IKK 2.1 : Jumlah operasional layanan perkantoran Satker	12	12	12	12	12						
Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi							85.550	85.550	196.050	199.050	202.550	Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
	SK (Output) 1 : Layanan Tata Usaha Pimpinan	12	12	12	12	12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12						
	SK (Output) 2 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Karir dan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi	1	1	1	1	1	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan peningkatan karir SDM Dikti	1	1	1	1	1						
	SK (Output) 3 : Sistem Pengelolaan Data dan Informasi SDM Dikti	2	2	2	2	2	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	IKK 3.1 : Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi pendidik	1	1	1	1	1						
	IKK 3.2 : Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi tenaga kependidikan	1	1	1	1	1						
	SK (Output) 4 : SDM DIKTI yang Mengikuti Pembinaan karir	12.500	16.000	16.100	16.300	16.500	34.000	34.000	36.500	37.500	40.000	

Pro gra m/ Ke giat an	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 4.1 : Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
	IKK 4.2 : Jumlah usulan angka kredit dosen yang dinilai	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500						
	IKK 4.3 : Jumlah usulan angka kredit tenaga kependidikan yang dinilai	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
	IKK 4.4 : Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti riset untuk peningkatan karir	-	-	100	300	500						
	SK (Output) 5 : SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	1.496	1.880	2.460	2.510	2.510	40.550	40.550	147.550	149.550	150.550	
	IKK 5.1 : Jumlah pendidik yang mengikuti peningkatan kompetensi	490	790	1.240	1.290	1.290						
	IKK 5.2 : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100						
	IKK 5.3 : Jumlah pendidik yang meraih prestasi	1	15	15	15	15						
	IKK 5.4 : Jumlah tenaga kependidikan yang meraih prestasi	5	75	105	105	105						
Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Iptek							5.000	5.000	5.000	11.500	11.500	Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
	SK (Output) 1 : SDM Iptek yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	200	200	200	200	200	3.000	3.000	3.000	9.500	9.500	
	IKK 1.1 : Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya	200	200	200	200	200						
	SK (Output) 2 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi SDM Iptek	1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Pro gra m/ Ke giat an	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Iptek	1	1	1	1	1						
	Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi						6.907.800	1.716.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	Direktorat Sarana dan Prasarana
	SK (Output) 1 : Layanan Tata Usaha Pimpinan	12	12	12	12	12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12						
	SK (Output) 2 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dikti	1	1	1	1	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana	1	1	1	1	1						
	SK (Output) 3 : PTN yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana	126	129	132	135	138	6.901.800	1.710.000	6.015.000	6.015.000	6.015.000	
	IKK 3.1 : Jumlah dokumen perencanaan teknis sarana dan prasarana Dikti	-	-	1	1	1						
	IKK 3.2 : Jumlah dokumen pengembangan sarana dan prasarana dikti	-	-	1	1	1						
	IKK 3.3 : Jumlah dokumen pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Dikti	-	-	1	1	1						
	IKK 3.4 : Jumlah PTN yang direvitalisasi sarana dan prasarananya	126	129	132	135	138						
	Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Iptek						1.500	1.500	158.500	179.500	200.500	Direktorat Sarana dan Prasarana
	SK (Output) 1 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Iptek	-	1	1	1	1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek	-	1	1	1	1						
	SK (Output) 2 : Lembaga Litbang yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana	-	-	15	17	19	-	-	157.000	178.000	199.000	

Pro gra m/ Ke giat an	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen perencanaan teknis sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1						
	IKK 2.2 : Jumlah dokumen pengembangan sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1						
	IKK 2.3 : Jumlah dokumen pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Iptek	-	-	1	1	1						
	IKK 2.4 : Jumlah lembaga Litbang yang direvitalisasi sarana dan prasarannya	-	-	15	17	19						
Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pendidikan							745.690	809.969	895.662	931.049	823.895	Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
	SK (Output) 1: Layanan Tata Usaha Pimpinan	12	12	12	12	12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	12	12	12	12						
	SK (Output) 2 : Beasiswa SDM Dikti	12.036	12.035	13.132	12.845	12.767	742.690	805.969	891.662	927.049	819.895	
	IKK 2.1 : Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S2 Dalam Negeri	2459	2.459	1.667	1.155	1.240						
	IKK 2.2 : Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S3 Dalam Negeri	6366	6.366	8.205	8.447	8.265						
	IKK 2.3 : Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S2 Luar Negeri	144	143	61	-	-						
	IKK 2.4 : Jumlah SDM Dikti penerima Beasiswa S3 Luar Negeri	967	967	1.099	1.143	1.162						
	IKK 2.5 : Jumlah SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Non Gelar	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100						
	SK (Output) 3 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualifikasi SDM Dikti	-	1	1	1	1	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	IKK 3.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Dikti	-	1	1	1	1						



Pro gra m/ Ke giat an	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Litbang						364.430	315.546	256.791	216.676	156.385	Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
	SK (Output) 1 : Beasiswa SDM IPTEK	657	1.813	1830	1872	699	126.493	283.646	243.503	205.198	154.688	
	IKK 1.1 : Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S2 Dalam Negeri	179	145	175	210	270						
	IKK 1.2 : Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S3 Dalam Negeri	100	86	89	102	125						
	IKK 1.3 : Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S2 Luar Negeri	28	80	151	125	73						
	IKK 1.4 : Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Beasiswa S3 Luar Negeri	103	272	272	245	231						
	IKK 1.5 : Jumlah SDM Iptek yang mengikuti Pendidikan Non Gelar	247	1.230	1.143	1.190	-						
	SK (Output) 2 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualifikasi SDM Iptek	2	2	2	2	2	237.937	31.900	13.288	11.478	1.697	
	IKK 2.1 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Iptek	1	1	1	1	1						
	IKK 2.2 : Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Sistem Inovasi Nasional (Riset Pro)	1	1	1	1	1						

